

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SORONG**

**Oleh:**

**Fanny Martafina Isir  
Nim: 19043145**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
POLITEKNIK NEGERI MANADO-JURUSAN AKUNTANSI  
PROGRAM STUDI S1 TERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN  
TAHUN 2024**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINAL TUGAS AKHIR .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>v</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	3
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>4</b>
2.1 Pengertian Akuntansi.....	4
2.2 Akuntansi Pemerintah.....	4
2.3 Pengelolaan Aset Daerah.....	6
2.4 Aset Tetap.....	8
2.5 Penelitian Sebelumnya.....	11
2.6 Kerangka Berpikir.....	15
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>16</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	16
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	16
3.3 Sumber Data.....	17
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	17
3.5 Teknik Analisis Data.....	17
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>19</b>

4.1 Gambaran Umum.....	18
4.2 Hasil Penelitian.....	26
<b>BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....</b>	<b>40</b>
5.1 Kesimpulan.....	40
5.2 Rekomendasi.....	40
DAFTAR PUSTAKA.....	41
LAMPIRAN.....	42



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam pemerintahan, dengan memberikan kesempatan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah (Raharjo, 2004). Menurut UU No. 32 tahun 2004 desentralisasi diartikan sebagai penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian kewenangan ini diwujudkan dengan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Suparmoko (2002) mengatakan otonomi daerah juga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Pemberlakuan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tersebut bukan hanya keinginan untuk pembangunan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah tetapi pemerintah daerah harus mengurus rumah tangganya sendiri secara mandiri. Dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut dan mengelolah keuangan daerah secara efektif dan efisien.

Salah satu bentuk pengelolaan yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengaplikasikan otonomi daerah tersebut ialah pengelolaan aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Menurut PSAP No. 1 tahun 2010 yaitu aset sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik dari pemerintah atau masyarakat

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban dalam pemerintah daerah ialah pengelolaan pada aset daerah yang dimiliki oleh setiap Organisasi Pemerintah Daerah. Pengelolaan aset daerah sangat diperlukan agar aset-aset tersebut dapat berguna dan tetap terjaga kondisinya, hal tersebut dilakukan agar dapat menunjang dalam keberhasilan pelaksanaan ketatausahaan Pemerintah Daerah

Pengelolaan aset tetap daerah menjadi salah satu hal penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah saat ini dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien. Secara yuridis pentingnya pengelolaan aset tetap daerah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel tercantum dalam peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang pengelolaan Barang Negara/Daerah, yang kemudian diatur pula dalam Pemendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dengan adanya tuntutan dari publik serta perkembangan teknologi informasi yang pesat maka pemerintah berupaya untuk melakukan perbaikan dalam pengelolaan aset tetap daerah.

Saat ini aset merupakan salah satu permasalahan akuntansi yang masih banyak kendala dalam penerapan akuntansinya, hal ini sesuai dengan pendapat Hines (1988) yang menyatakan bahwa akuntansi aset dalam beberapa hal terdapat memiliki kekurangan di bandingkan dengan akuntansi untuk aspek lainnya. Dengan demikian pengelolaan aset daerah tetap bukanlah perkara yang mudah, untuk itu pemerintah dituntut harus mengelola aset tetap yang dimiliki dengan sebaik-baiknya berdasarkan peraturan prinsip yang berlaku.

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Sorong merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonom dan tugas pembantuan. Adapun Pengelolaan Barang Milik Daerah yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sorong yaitu Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penghapusan, Inventarisasi, Dokumentasi, dan Pemeliharaan. Terdapat kendala dalam Pengelolaan aset tetap daerah di Kota Sorong yang belum memadai diantaranya yaitu dalam hal perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah belum sesuai dengan kebutuhan pengelolaan barang milik daerah, penatausahaan aset tetap Pemerintah Kota dan pengamanan aset belum memadai sehingga perencanaan kebutuhan barang milik daerah tidak menggambarkan kebutuhan barang milik daerah sebenarnya pada Operasi Perangkat Daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dan permasalahan pada Pemerintah Daerah terkait pengelolaan aset tetap daerah maka penulis tertarik untuk membahas serta melakukan Penelitian dengan Judul “**Analisis Pengelolaan Aset Tetap Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sorong**”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Pengelolaan Aset Tetap Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sorong?
2. Apakah Pengelolaan Aset Tetap Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sorong sudah sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Aset Tetap Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sorong
2. Apakah Pengelolaan Aset Tetap Daerah sudah sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016

## 1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Peneliti ini diharapkan dapat dijadikan evaluasi dengan tujuan memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan Manajemen Aset yang ada.

2. Bagi BPKAD Kota Sorong

Peneliti ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman penulis mengenai Aset Daerah di Kota Sorong.

3. Bagi Politeknik Negeri Manado

Penelitian ini dapat di gunakan sebagai informasi bagi pembaca dan sebagai acuan untuk bahan pembelajaran kedepan khususnya bagi Mahasiswa Politeknik Negeri Manado.